



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama :
2. Jabatan : **SEKRETARIS KELURAHAN**
3. NHK :

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.090.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/70 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KOTA JAKARTA
TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 129.200.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,3 G MT MINIBUS Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2022 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
13.200.000
4. MOTOR, YAMAHA 2022 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.050.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 360.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.593.250.000

III. HUTANG Rp. 180.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.413.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

FORMULIR PEMANTAUAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN 2024
KELURAHAN PEKAYON KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No	Nama	NIP	NO HP	PENYAMPAIAN LAPORAN		VERIFIKASI		WAJIB LHKPN/LHKASN	KETERANGAN
				SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM		
1	Lurah			√	-	√	-	LHKPN	Periodik
2	Sekretaris Kelurahan			√	-	√	-	LHKPN	Periodik
3	Kasi Pemerintahan			√	-	√	-	LHKPN	Periodik
4	Kasi Ekbang			√	-	√	-	LHKPN	Periodik
5	Staff			√	-	√	-	LHKPN	Akhir Menjabat
6	Staff			√	-	√	-	LHKPN	Awal Menjabat

Jakarta, 31 Maret 2025
Ptt. Lurah Kelurahan Pekayon
Kota Administrasi Jakarta Timur

